

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini penulis akan memulai dengan latar belakang masalah pada skripsi ini dengan membahas secara singkat tentang informasi-informasi umum tentang Prancis dan hubungan bilateralnya dengan Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan sekilas tentang lembaga kebudayaan milik Prancis di Indonesia, yakni Institut Français d'Indonesie yang dipilih oleh pemerintah Prancis untuk menyelenggarakan Festival Sinema Prancis di Indonesia sebagai salah satu alat dalam diplomasi kebudayaan. Selanjutnya, akan dibahas rumusan masalah yang membatasi sejauh mana penelitian ini dilaksanakan, dilanjutkan dengan kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metode analisis dan pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

Latar Belakang Masalah

Prancis terkenal sebagai sebuah negara dengan kekayaan budayanya yang besar, dan hal tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungannya sebagai sarana keberlangsungan perkembangan negara. Kekayaan budaya yang dimiliki Prancis tentunya berperan besar dalam membentuk pola hubungan antar negara yang dimiliki oleh Prancis. Oleh karena itu, penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebudayaan Prancis

(khususnya film) dan hubungannya terhadap pola hubungan antar negara yang dimilikinya.

Prancis juga merupakan salah satu negara Uni Eropa yang memiliki pengaruh besar pada bidang kebudayaan, ekonomi, militer, dan politik di Eropa serta dunia (Etrangeres, 2005). Salah satu hal yang selalu melekat dari citra Perancis adalah kebudayaan. Seperti yang lumrah kita ketahui, Perancis memiliki bangunan – bangunan bersejarah yang menarik minat wisatawan dalam negeri maupun mancanegara untuk mengunjungi negara yang terkenal dengan romantismenya itu.

Pemikiran filsuf – filsuf kuno yang berasal dari Perancis seperti Montesque dan Jean Jacques Rousseau juga ikut berkontribusi besar dalam budaya dan kesusastraan Perancis (Oktaviati, 2009). Bagi Perancis, aktivitas kebudayaan merupakan salah satu bentuk dari politik luar negerinya dalam bidang diplomasi kebudayaan. Oleh karena itu Perancis mendirikan pusat kebudayaan di berbagai negara untuk menyebarkan pengaruh kebudayaan dan bahasanya, termasuk di Indonesia dalam upaya memperkuat hubungan antar negara yang sudah lama dibangun (France Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2019)

Jika membahas tentang hubungan antar negara, tentunya akan banyak ditemukan pembahasan tentang istilah diplomasi. Secara sederhana, diplomasi dapat diartikan sebagai : *the art and practice of conducting negotiations between nations* atau dapat kita terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia secara bebas

sebagai seni dan praktik dalam melaksanakan negosiasi antar negara (Merriam Webster's Online Dictionary, 2019). Dengan kata lain, diplomasi dapat diartikan juga sebagai cara, dengan peraturan dan tata-krama tertentu, yang digunakan oleh suatu negara yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut dalam hubungannya dengan negara lain atau dengan masyarakat internasional (Roy, 1991).

Implementasi kebijakan luar negeri sebuah negara tak dapat terpisahkan dari diplomasi. Kebijakan luar negeri dan diplomasi adalah dua hal yang saling berhubungan dan memiliki tujuan yang sama, yakni menyukseskan kepentingan nasional (*national interest*). Kebijakan luar negeri akan menemukan kesulitan-kesulitan menemukan tujuannya jika diplomasi tak dapat dengan baik melaksanakan tugasnya. Di sisi lain, diplomasi tidak bisa berjalan dengan mulus apabila tidak disertai dengan arahan dari kebijakan luar negeri (Hanggarini, 2009).

Dalam perkembangannya kemudian, apalagi pada era globalisasi seperti sekarang, negara tidak lagi menjadi aktor tunggal (*the sole actor*) dalam diplomasi. Pelaku-pelaku diplomasi tidak hanya negara atau lembaga dan pejabat yang berkaitan dengan negara saja, beberapa aktor dapat terlibat secara langsung dalam proses diplomasi dan proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Kalangan swasta atau individu-individu yang mewakili kepentingan nasional negaranya dengan sepengetahuan atau persetujuan pemerintah. Oleh karena perkembangan itu, dalam dunia internasional masa ini kita dapat mengenal istilah-

istilah seperti “*first-track diplomacy*”, “*second-track diplomacy*”, bahkan “*third-track diplomacy*” dan “*multi-track diplomacy*”. Intinya, diplomasi memerlukan banyak pihak lain (selain negara) untuk bisa terlibat dalam menyukseskannya.

Salah satu bentuk diplomasi dalam hubungan internasional adalah diplomasi kebudayaan. Diplomasi kebudayaan digunakan sebagai cara untuk mempromosikan maupun memperkenalkan identitas suatu negara dengan negara lain ataupun masyarakat internasional. Pelaku dari diplomasi kebudayaan sendiri adalah pemerintah dan non-pemerintah, yakni seperti individu, *non-governmental organization*, *multinational corporation*, dan lain-lain.

Dalam hal ini, kebudayaan secara makro diartikan sebagai “Keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar” (Bakker, 1984). Budaya sendiri berasal dari bahasa Sansakerta “*buddhayah*” yang merupakan bentuk jamak dari “budhi” atau “akal”. Menurut Sidi Gazalba, budaya adalah “cara berpikir dan cara merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial (masyarakat) dalam suatu ruang dan waktu” (Aslan & Suhari, 2018). Kebudayaan adalah sesuatu yang inheren dalam kehidupan manusia. Mengutip Rene Char, penyair Perancis, kebudayaan adalah sesuatu yang diwariskan tanpa surat wasiat (*notre héritage n'est précédé d'aucun testament*). Kebudayaan diwariskan kepada manusia untuk mencapai kondisi ideal yang dicita-

citakan dalam kehidupan melalui nilai-nilai yang disepakati bersama (Sutrisno & Putranto, 2005).

Keseluruhan definisi tersebut terlampau luas jangkauannya. Sehingga, nyaris semua bentuk diplomasi bisa digolongkan ke dalam diplomasi kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mempermudah kajian, kebudayaan di sini akan dibatasi hanya dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kesenian. Salah satu produk dari kesenian adalah film, yang merupakan suatu bentuk kesenian fotografi yang tercipta dari cita, rasa, dan karsa manusia yang dianggap sebagai hasil dari karya seni modern. Pada mulanya, film dipertontonkan kepada masyarakat luas dengan sistem berbayar pada tahun 1895. Hal tersebut menjadi peristiwa munculnya film dan bioskop pertama kali. Upaya pembuatan film sebenarnya sudah lama dilakukan jauh sebelum tahun 1895, yang pada saat itu industri film awalnya hanya menampilkan gambar hitam putih dan tanpa suara, lalu berkembang menampilkan tampilan yang lebih berwarna dan menggunakan efek-efek yang membuat film terlihat lebih nyata (Dixon & Foster, 2013).

Dewasa ini, film telah memiliki perluasan makna dari salah satu media hiburan menjadi sebuah alat untuk mencapai suatu kepentingan. Film merupakan sebuah media yang menunjukkan keadaan masyarakat tertentu dan situasi-situasi yang ada. Hal ini membuat film menjadi media untuk berkomunikasi dengan masyarakat lain, baik secara tersirat maupun tersurat berbentuk audio visual. Film menjadi alat yang memiliki potensi memiliki nilai *soft power* sehingga dipandang bisa menjadi

instrumen untuk memasok ideologi dan nilai-nilai, bahkan menjadi alat untuk mencapai kepentingan politik.

Institut Français Indonesia (IFI) merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Lembaga Indonesia-Prancis dan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Prancis. IFI adalah lembaga yang berdiri di bawah naungan The Cooperation and Cultural Action Service (SCAC) Kedutaan Prancis di Indonesia. Ia dibentuk dengan misi untuk memperkenalkan budaya Prancis. Lebih dari itu, menurut Philippe Zeller, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, IFI telah mencatatkan dirinya dalam ranah budaya dan linguistik untuk mengajarkan bahasa Prancis dan memfasilitasi pertukaran siswa, menyebarkan serta menggagas kolaborasi seputar seni budaya Prancis maupun Eropa, menawarkan suatu pusat informasi tentang Prancis kontemporer, dan juga mengajak untuk mengadakan diskusi tentang tema-tema yang sangat berarti bagi Prancis dan Indonesia (Institut Français Indonesia Yogyakarta, 2010).

Selain Prancis, negara-negara lain juga melakukan diplomasi melalui pembukaan semacam pusat kebudayaan, seperti yang dilakukan Inggris dengan *British Council*, Jerman dengan *Goethe Intitute*, Spanyol dengan *Intituto Cervantes*, dan lain-lain. Pusat-pusat kebudayaan tersebut ada yang berada di bawah naungan pemerintah negara yang bersangkutan, namun banyak juga yang bersifat otonom.

Ibarat manusia, keberadaan lembaga seperti ini dimaksudkan sebagai tangan yang bisa menjangkau banyak hal di lingkungan sekitarnya. Hal-hal tersebut tentunya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kedutaan Besar Republik Prancis di Indonesia. Sebagai sebuah lembaga di bawah naungan Kedutaan Besar Prancis, IFI bisa disebut sebagai kepanjangan “tangan kebudayaan” diplomasi Prancis di Indonesia.

Selain memiliki peran signifikan dalam mewarnai panorama kebudayaan melalui linguistik, jalur pendidikan, kesenian dan kebudayaan, IFI juga aktif dan terbuka dalam menyesuaikan diri dalam evolusi masyarakat Indonesia dalam menyampaikan pesan kebudayaan tentang Prancis yang dinamis, beraneka ragam dan berbudaya dalam arti luas. IFI juga memiliki peran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan memfasilitasi pertukaran dan pertarungan gagasan-gagasan dalam kebudayaan serta kerap mengadakan acara-acara bertema kesenian, misalnya pameran karya seni, pementasan, pemutaran film, konser musik dan sebagainya. Hal ini berarti bahwa kebudayaan Prancis bisa dikatakan berakar kuat ke dalam dan menjulang tinggi dan memiliki dahan-dahan atau ranting-ranting yang menjulang ke luar menjangkau menaungi setiap kebudayaan yang bersinggungan dengannya. Tidak mustahil bagi IFI untuk menempatkan dirinya pada posisi yang berdekatan dengan kebudayaan Indonesia serta berpeluang untuk membuka kemungkinan terjadinya dialog antara misi kebudayaan Prancis dengan Indonesia.

Keberadaan IFI merupakan sebuah gejala yang dapat dibidang unik. Di mana tidak banyak negara-negara yang memiliki misi kebudayaan dengan wadah organisasi dan intensitas kegiatan setangguh dan seintens IFI. Apalagi, IFI berada di kota-kota besar dan penting di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya. Sebuah strategi kebudayaan yang sangat patut untuk diperhitungkan. Prancis seakan sadar betul bahwa kebudayaan memiliki daya tawar (*state branding*) bagi suatu negara sehingga dapat membangun sebuah citra di tingkat internasional.

Dikarenakan jumlah dan kedudukannya yang tersebar di kota-kota penting kunci perkembangan kebudayaan di Indonesia serta aktivitasnya yang luas dan merambah pada aksi yang intensif. IFI memiliki potensi dan peran yang kuat dalam memberi pengaruh (*influence*) kepada arah perkembangan pemikiran dan kebudayaan di Indonesia. Apalagi, Prancis memang dikenal memiliki tradisi seni, budaya dan filsafat yang berakar kuat. Dalam perjalanannya, IFI kemudian menyelenggarakan sebuah kegiatan kebudayaan yang layak untuk diperhitungkan dan ditinjau keberadaannya di Indonesia, yakni Festival Sinema Prancis .

Festival Sinema Prancis pertama kali diselenggarakan pada 14 Juni 1985 oleh Federasi Sinema Nasional Prancis (FNCF) bersama dengan Kementerian Kebudayaan Prancis (melalui IFI) dan persatuan profesi sinema di Indonesia. Festival ini diselenggarakan setiap tahun dan tidak hanya diselenggarakan di Indonesia saja, melainkan di banyak negara lain. Gebyar acara ini terwujud atas kerja sama banyak pihak lain selain IFI. Sebagai contoh, sejak tahun 2004, BNP

Paribas telah menjadi mitra pelaksana Festival Sinema Prancis . BNP Paribas memperpanjang Pesta Sinema dengan cara memberikan tiket untuk masuk kembali menonton dengan harga khusus. Pertunjukan ini sering kali menyajikan film-film yang khusus bagi kawula muda. Para penggemar film dapat menikmati berbagai hiburan hanya dengan membayar 25 ribu rupiah per pertunjukan. Festival Sinema Prancis diadakan di seluruh dunia. Salah satu agenda kegiatan ini adalah meningkatkan kesempatan pertukaran kebudayaan Prancis- Indonesia melalui film.

Tahun ini, dalam edisinya yang ke 21 tahun, Festival Sinema Prancis kembali hadir di tengah-tengah pencinta film di Indonesia setelah selama hampir lima tahun terhenti pelaksanaannya. Sebagai festival film asing pertama yang pernah ada di Indonesia, festival ini kembali muncul dengan membawa “angin segar” dari dunia perfilman Prancis yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Tidak lupa pula Festival Sinema Prancis 2019 turut mengadakan sejumlah lomba, lokakarya (*workshops*) dan *co-creative agenda* yang diprakarsai oleh beberapa profesional dari bidang film yang ternama, baik dari Prancis maupun Indonesia. Dari sinilah bisa kita mengetahui bahwa Festival Sinema Prancis bisa dibilang cukup penting keberadaannya karena cukup representatif dan signifikan perannya sebagai instrumen diplomasi budaya lewat industri sinema Prancis-Indonesia.

Menilik besarnya kesempatan dan peluang yang dimiliki oleh IFI untuk terlibat dalam proses diplomasi kebudayaan melalui Festival Sinema Prancis di Indonesia, maka, hampir pasti bahwa IFI memiliki kekuatan efektif yang menjadikannya

mampu berperan sebagai *agent* dialog kebudayaan antara Prancis dan Indonesia. Pada titik inilah kemudian bisa kita maknai, bahwa kehadiran lembaga kebudayaan, dalam hal ini IFI, memiliki arti yang lebih penting, lebih jauh, dan lebih berkualitas dibanding dari hanya sekadar sebagai lembaga bahasa maupun kebudayaan biasa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka untuk memudahkan pemecahan masalah dan sebagai pedoman dalam pembahasan lebih lanjut, dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu:

“Mengapa Prancis menyelenggarakan Festival Sinema Prancis di Indonesia?”

Kerangka Pemikiran

Dalam memberikan jawaban terhadap rumusan masalah menggunakan pertanyaan mengapa, maka penulis akan menggunakan konsep kepentingan nasional, politik luar negeri, dan diplomasi kebudayaan yang digunakan sebagai alat bantu untuk mengeksplorasi peran IFI dalam keberlangsungan diplomasi kebudayaan melalui Festival Sinema Prancis di Indonesia.

1. Konsep Diplomasi Kebudayaan

Diplomasi merupakan suatu usaha suatu negara dalam bernegosiasi dengan negara lain secara damai untuk mencapai suatu kepentingan nasional di kalangan masyarakat internasional. Diplomasi menggunakan ancaman maupun kekuatan militer dapat dilakukan apabila diplomasi dengan cara damai telah gagal dilakukan. Kebudayaan merupakan suatu keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang dijadikan sebagai milik manusia dengan cara belajar terhadap lingkungan. Maka, diplomasi kebudayaan merupakan suatu tindakan, gagasan, dan hasil yang digunakan dalam bernegosiasi untuk mencapai suatu kepentingan nasional. Diplomasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan kebudayaan mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian, maupun kebudayaan makro seperti propaganda. Kebudayaan secara makro juga dapat dijadikan sebagai sarana bagi pemerintah untuk melakukan propaganda dengan tujuan untuk mempromosikan suatu agenda ataupun *brand*.

Istilah kebudayaan dalam kajian ilmu sosial sering diidentikkan dengan nilai-nilai tradisi, adat maupun karakter dari masyarakat yang kemudian mewariskan atmosfer peradaban tersebut dari zaman sejarah. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mendefinisikan kebudayaan sebagai:

“Semua hasil karya cipta, rasa, dan karsa manusia. Karya menghasilkan teknologi kebendaan atau *material culture* yang diperlukan manusia untuk

menguasai sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk kehidupan masyarakat” (Soekanto, 2000:172).

Unsur-unsur kebudayaan tersebut kemudian mengalami asimilasi seiring dengan keberadaan perkembangan ilmu HI dalam kegiatan berdiplomasi yang bermuara menjadi aktivitas yang disebut diplomasi kebudayaan. Penggabungan kata tersebut secara umum menggambarkan seni interaksi dalam lingkup diplomasi tetapi dengan memanfaatkan instrumen dalam estetika kebudayaan. Diplomasi kebudayaan menurut Wahyuni Kartika menjelaskan:

“Diplomasi kebudayaan adalah diplomasi yang memanfaatkan aspek kebudayaan untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam percaturan masyarakat internasional. Diplomasi kebudayaan juga dianggap sebagai alat untuk memperlihatkan tingkat peradaban suatu bangsa. Selain itu definisi lain mengenai diplomasi kebudayaan adalah suatu teknik pemanfaatan dimensi kekayaan dalam percaturan hubungan antar bangsa internasional” (Warsito dan Kartikasari, 2007:25).

Kebudayaan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempererat hubungan internasional. Itulah sebabnya sejak dahulu suatu kebudayaan diperkenalkan para diplomat kepada masyarakat internasional untuk mempengaruhi atau memperbaiki sikap dan pandangan mereka terhadap negaranya. Indonesia pun memanfaatkan kebudayaan sebagai sarana diplomasi.

Menurut S.L, Roy ada istilah yang lebih baku dari diplomasi kebudayaan yakni *diplomacy by cultural performance*. Namun khalayak banyak terlanjur menekankan istilah yang sederhana yaitu diplomasi kebudayaan untuk memberi pengertian bahwa diplomasi dengan menggunakan kegiatan-kegiatan budaya seperti pengiriman misi kesenian ke negara lain untuk menimbulkan dan memperoleh kesan atau citra baik. Tetapi diplomasi dengan mengatasnamakan budaya tidak selalu unsur harus dengan budaya kuno atau tradisional Sebab penggambaran secara makro dari diplomasi kebudayaan adalah usaha yang dilakukan oleh suatu negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional melalui unsur kebudayaan termasuk di dalamnya pemanfaatan bidang-bidang ideologi, teknologi, politik, ekonomi, militer, pendidikan, sosial budaya maupun kebahasaan dalam percaturan masyarakat internasional (Warsito dan Kartikasari, 2007:31-33).

Sedangkan kekuatan diplomasi suatu bangsa di kancah internasional banyak ditentukan oleh kekuatan nasional bangsa tersebut. Unsur kekuatan nasional meliputi geografi, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah (Morghentau, 2010:135).

Tujuan dari diplomasi kebudayaan adalah untuk mempengaruhi pendapat umum (masyarakat internasional) guna untuk mendukung suatu kebijakan politik luar negeri tertentu. Maka, sasaran dari diplomasi kebudayaan ini adalah pendapat

umum, baik dari level nasional hingga internasional. Hal ini diharapkan dapat memengaruhi pengambilan keputusan dari pemerintah maupun organisasi internasional. Diplomasi kebudayaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah maupun individu, dan kolektif juga dapat menjadi aktor dari diplomasi kebudayaan. Pelaku dari diplomasi dan sasaran dari dilakukannya diplomasi kebudayaan tidak hanya aktor pemerintahan saja, masyarakat dapat menjadi aktor dari diplomasi kebudayaan dengan sasaran pemerintahan dan begitu pun sebaliknya.

Diplomasi kebudayaan dianggap sebagai alat untuk memperlihatkan tingkat peradaban suatu bangsa. Seseorang yang sudah menaruh perhatian terhadap sesuatu atau kebudayaan suatu negara tertentu, maka akan muncul rasa ingin tahu mendalam tentang negara yang memiliki ketertarikan tersebut. Diplomasi kebudayaan melalui seni dan budaya dapat memberikan kontribusi yang positif dalam menciptakan perdamaian dunia. Diplomasi kebudayaan dianggap dapat merealisasikan semboyan "*a million friends and zero enemy*" melalui hubungan antar masyarakat yang dikenal sebagai "*people contact*" dan dapat terjalin lebih jauh lagi. Sehingga kebudayaan dipandang lebih berpengaruh daripada dengan menggunakan kekuatan militer (Sinulingga, 2017).

Diplomasi kebudayaan merupakan fenomena lama, dalam beberapa literatur diplomasi kebudayaan disebutkan sebagai Cultural Techniques in Foreign Policy

(Warsito & Kartikasari, 2007:1). Sehingga saat ini diplomasi kebudayaan banyak dipakai dalam menyampaikan kebijakan luar negeri suatu negara.

Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur- struktur sosial, religiusm dan lain-lain yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Kemudian menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat (Simanjuntak, 2006).

Dalam buku *Diplomasi : Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang, Studi Kasus Indonesia* Kebudayaan, Tulus Warsito & Wahyuni Kartikasari mendefinisikan Diplomasi Kebudayaan sebagai berikut :

"Diplomasi kebudayaan adalah usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian, ataupun secara makro sesuai dengan ciri-ciri khas yang utama, misalnya propaganda, dll, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi, ataupun militer. Beberapa literatur menyebutnya dengan propaganda" (Warsito & Kartikasari, 2007:4).

Diplomasi kebudayaan menunjuk pada kegiatan-kegiatan di bidang budaya yang diintegrasikan ke dalam kebijakan politik luar negeri suatu negara dan pelaksanaannya dikoordinasikan sepenuhnya oleh Departemen Luar Negeri (Deplu). IFI yang mendapat dukungan penuh dari kementerian luar negeri Perancis, karna diplomasi kebudayaan juga harus didukung dengan kekuatan dan kewibawaan ekonomi, politik, dan militer. Oleh karena itu, diplomasi kebudayaan pada umumnya efektif dijalankan oleh negara-negara maju seperti Perancis. Seperti penjelasan diplomasi kebudayaan dalam buku Tulus Warsito, pada dasarnya ada dua hal penting dalam diplomasi kebudayaan. Pertama, diplomasi mikro bahwa diplomasi kebudayaan hanya menyangkut pemanfaatan kebudayaan untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri. Kedua, diplomasi makro bahwa pada saat dijelaskan bahwa diplomasi kebudayaan harus melibatkan kekuatan dan kewibawaan politik, ekonomi, dan militer, dan semua itu dimiliki oleh negara maju, maka efektivitas diplomasi kebudayaan dipengaruhi oleh ketidaksetaraan hubungan di antara negara-negara yang terlibat dalam diplomasi kebudayaan itu. Terdapat beberapa tujuan dari diplomasi kebudayaan :

1. Tujuan diplomasi kebudayaan lebih luas dari pada pertukaran kebudayaan, misalnya mengirim utusan keluar negeri untuk memperkenalkan kebudayaan suatu negara ke negara lain.
2. Membangun pengetahuan baru dan kepekaan terhadap negara lain untuk mewujudkan hubungan yang lebih baik antara masyarakat dengan bangsanya.

3. Mempengaruhi pendapat masyarakat negara lain guna mendukung suatu kebijakan luar negeri tertentu (Soedjatmiko dan Thompson, 1976:406).

Kemudian Warsito menjelaskan lebih lanjut konsep-konsep diplomasi kebudayaan, dilihat dari bentuk, tujuan dan sarana nya, adalah sebagai berikut:

1. Ekshibisi atau pameran merupakan bentuk diplomasi paling konvensional mengingat gaya diplomasi modern adalah diplomasi secara terbuka.
2. Propaganda, merupakan penyebaran informasi mengenai kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, maupun nilai-nilai sosial ideologis suatu bangsa.
3. Kompetisi, berupa olahraga, kontes kecantikan, ataupun kompetisi ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.
4. Penetrasi, merupakan salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan melalui bidang-bidang perdagangan, ideologi, dan militer.
5. Negosiasi, dalam lingkungan budaya negosiasi dilakukan sebelum negosiasi tersebut dilaksanakan, karena lingkungan budaya tersebut akan mempengaruhi cara pengambilan keputusan dalam suatu negosiasi yang akan dilaksanakan.
6. Pertukaran Ahli, merupakan salah satu jenis dari hasil negosiasi. Pertukaran ahli mencakup masalah kerja sama pertukaran budaya secara luas, yakni dari kerja sama beasiswa antar negara, sampai dengan pertukaran ahli dalam bidang tertentu. Sarana diplomasi dibagi menjadi dua, yaitu, infrastruktur

yang meliputi benda elektronik, audio visual, dan media cetak dan superstruktur yang meliputi pariwisata, para militer, pendidikan, kesenian, perdagangan, opini publik, dan olahraga.

Sedangkan cara diplomasi kebudayaan dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung melalui kesepakatan bilateral, multilateral, konvensi internasional, dan secara tidak langsung, melalui negara ketiga atau melalui lembaga internasional (Warsito & Kartikasari, 2013 : 21-20). Hubungan antara situasi, bentuk, tujuan, dan sarana diplomasi kebudayaan dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel Hubungan Antara Situasi, Bentuk, Tujuan, dan Sarana Diplomasi Kebudayaan

SITUASI	BENTUK	TUJUAN	SARANA
DAMAI	-eksibisi -kompetisi -pertukaran misi -negosiasi -konfrensi	-pengakuan -hege moni -persahabatan -penyesuaian	-pariwisata -olah raga -pendidikan -perdagangan -kesenian
KRISIS	-propaganda -pertukaran misi -negosiasi	-persuasi -penyesuaian -pengakuan -ancaman	-politik -mass media -diplomatik -misi tingkat tinggi -opini publik
KONFLIK	-terror -penetrasi -pertukaran misi -boikot -negosiasi	-ancaman -subversi -persuasi -pengakuan	-opini publik -perdagangan -para militer -forum resmi -pihak ketiga
PERANG	-kompetisi -terror -penetrasi -propaganda -embargo -boikot -blokade	-dominasi -hege moni -ancaman -subversi -pengakuan -penaklukan	-militer -para militer -penyelundupan -opini publik -perdagangan -supply barang konsumtif(termasuk senjata)

Tabel 1.1 Hubungan antara situasi, bentuk, tujuan, dan sarana diplomasi kebudayaan

Sumber: Buku Diplomasi Kebudayaan (Warsito & Kartikasari, 2013:31)

Keterangan : Semakin negatif hubungan antar dua (atau lebih) negara bangsa, maka semakin banyak/intensif bentuk diplomasi kebudayaan yang dipakai. Dan dalam pengertian konvensional, diplomasi kebudayaan dikenal hanya pada waktu damai saja.

Kemudian, dijelaskan pula ada dua pendekatan yang dipakai oleh negara-negara berkembang dalam hubungannya terhadap kebudayaan modern dunia, yaitu yang pertama melalui konsep bipolaritas, atau dikotomi global dalam hal ini kebudayaan modern dunia yang digolongkan hanya dalam 2 (dua) kelompok, yakni maju dan berkembang, atau modern dan tradisional. Bahwa posisi negara yang sedang berkembang berada di bawah negara-negara maju, sehingga terdapat ketergantungan antara negara berkembang terhadap negara maju untuk menyejajarkan posisinya. Yang kedua, pendekatan Spektrum Perkembangan Kebudayaan, menjelaskan bahwa pusat kebudayaan modern di negara yang sedang berkembang sesungguhnya merupakan budaya dari pinggiran yang berpola kepada pusat-pusat budaya modern dunia (Warsito & Kartikasari, 2007 : 33-35).

Diplomasi kebudayaan juga memfokuskan aktivitasnya kepada Pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, dan olahraga. Penulis mendapati sebagian pendapat mengartikan diplomasi kebudayaan dalam pengertian budaya secara makro. Sehingga, bidang aktivitasnya pun juga bertambah luas serta bias. Agar menghindari bias dalam mengartikan diplomasi kebudayaan, maka dalam

penelitian ini, peneliti akan memfokuskan bidang kajian hanya pada pengertian diplomasi kebudayaan secara mikro. Lebih khusus lagi, penelitian ini akan mengerucut pada bidang Pendidikan, kesenian dan kebudayaan yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas IFI, terutama dalam penyelenggaraan Festival Sinema Prancis di Indonesia.

2. Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Hans Morgenthau menyatakan bahwa setiap negara bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional dalam politik internasional. Kepentingan nasional merupakan salah satu faktor penentu dalam pembentukan politik luar negeri suatu negara. Morgenthau juga menyatakan bahwa strategi dalam melakukan diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, sehingga suatu negara dapat menentukan model diplomasi yang akan digunakan. Sehingga kepentingan nasional dapat dijadikan sebagai dasar pedoman untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam berinteraksi di sistem internasional. Selain itu, kepentingan nasional juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur atas keberhasilan politik luar negeri suatu negara (Mas'ood, 1990). Apabila telah tercapai kepentingan nasional suatu negara, maka berhasil pula politik luar negeri suatu negara tersebut.

Kepentingan nasional terdiri dari beberapa unsur, yaitu: 1) kelangsungan hidup, eksistensi, pengakuan, keutuhan wilayah atau kedaulatan, 2) keamanan, 3) kesejahteraan, 4) prestige, 5) wilayah pengaruh (*sphere of influence*). Setiap negara

yang berdiri berkeinginan untuk mendapat pengakuan atas keberadaannya oleh rakyat dan negara-negara lain. Setelah unsur eksistensi terpenuhi, negara perlu memiliki jaminan keamanan yakni adanya hubungan saling percaya antar negara di sistem internasional. Selanjutnya negara akan mengejar kesejahteraan yang tercermin dari tingkat perekonomian. Kemudian negara berusaha unjuk diri dengan *prestige* Yang terakhir, negara akan berkeinginan untuk memiliki wilayah yang berada di bawah pengaruhnya untuk menjadi negara superior (Warsito, Rasionalitas Politik, 2017).

Hubungan bilateral yang dijalin antar dua negara tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara yang mendasarinya untuk melakukan kerjasama. Dalam buku Perwita dan Yani para penganut realis mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut:

“Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar power, di mana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional”.

Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara

dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Djelantik, 2008).

Kapabilitas negara dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dari pertahanan, karena ketahanan nasional bermakna ketahanan yang terpadu dari aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.

Coulombis dan Wolfe (2004) membagi unsur-unsur kekuatan nasional dua kategori atau penggolongan:

1. Tangible elements (yang konkrit nyata wujudnya dan dapat diukur):
 - Populasi (jumlah penduduk)
 - Luas wilayah (termasuk letak-letak geopolitik atau geostrategik)
 - Sumber alam dan kapasitas industri
 - Kapasitas Produksi pertanian
 - Kekuatan dan mobilitas militer

2. Intangible elements (tidak dapat diukur)

- Kepemimpinan nasional (leadership and personality)
- Pendayagunaan (efisiensi) organisasi-birokrasi
- Tipe dan gaya pemerintahan
- Keterpaduan masyarakat (social cohesiveness)
- Diplomasi, dukungan luar negeri, dan kebergantungan

Kepentingan nasional merupakan visi negara yang dibentuk dari unsur-unsur vital negara itu sendiri, namun hal ini tidak berarti bahwa kepentingan nasional bukan buatan manusia. Kepentingan nasional sering digunakan sebagai doktrin satu negara dalam rangka kepatuhan masyarakat negara tersebut sehingga tercipta ketertiban yang lebih besar dengan skala internasional.

Kepentingan nasional memiliki kesamaan dengan tujuan nasional, akan tetapi hakikatnya berbeda. Tujuan-tujuan nasional (national objectives, national goals) umumnya berjangka panjang, lebih mendasar, memiliki cakupan luas, cenderung filosofis, dan bersifat makro. Sedangkan kepentingan nasional merupakan visi negara yang dibentuk dari unsur-unsur vital negara itu sendiri, namun hal ini tidak berarti bahwa kepentingan nasional bukan buatan manusia. Kepentingan nasional sering digunakan sebagai doktrin satu negara dalam rangka kepatuhan masyarakat negara tersebut sehingga tercipta ketertiban yang lebih besar dengan skala internasional. Kepentingan nasional memiliki kesamaan dengan tujuan nasional, akan tetapi hakikatnya berbeda.

Setiap negara merefleksikan sesuatu yang berbeda ketika berinteraksi dalam lingkungan internasional sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing. Untuk menciptakan hubungan yang tertib di dunia internasional dalam pencapaiannya akan tujuan-tujuan nasionalnya, salah satu hal yang perlu untuk dilakukan adalah menetapkan rumusan prioritas kepentingan nasional. Menurut Robinson, terdapat beberapa klasifikasi yang membagi kepentingan nasional, yaitu:

1. *Primary Interest*, dalam kepentingan nasional ini perlindungan atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Semua negara mempunyai kepentingan ini dan sering dipertahankan dengan pengorbanan besar sehingga pencapaian kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan.

2. *Secondary Interest*, kepentingan selain kepentingan primer tetapi cukup memberikan kontribusi, seperti melindungi warga negara di luar negeri dan mempertahankan kekebalan diplomatik di luar negeri.

3. *Permanent Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup lama.

4. *Variable Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting pada suatu waktu tertentu.

5. *General Interest*, kepentingan yang diberlakukan untuk banyak negara atau untuk beberapa bidang khusus seperti dalam bidang perdagangan dan lainlain

6. *Specific Interest*, kepentingan yang tidak termasuk kepentingan umum, namun biasanya diturunkan dari sana (Coulumbis dan Walfe. 2004 : 110).

Namun pada dasarnya setiap negara memiliki kepentingan nasional untuk mendapatkan kekuasaan, yaitu segala hal yang bisa memberikan suatu negara kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi negara lain agar bertindak sesuai kehendaknya. Dengan begitu politik luar negeri suatu negara akan berhasil dan kepentingan nasionalnya yang lain akan tercapai. Kekuasaan dapat dicapai melalui berbagai cara seperti pemaksaan atau ancaman maupun kerja sama. Cara-cara yang akan digunakan untuk mencapai kepentingan nasional tersebut adalah dengan memanfaatkan kekuatan nasional.

Kekayaan budaya adalah salah satu kekuatan nasional bagi Prancis. Di mana kekayaan budaya merupakan unsur kekuatan nasional yang tidak terukur atau *intangibile*. Dalam hal ini IFI yang memiliki fokus di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga kesenian juga dapat digolongkan pada dalam aktor diplomasi kebudayaan Prancis. Sehingga kekayaan budaya Prancis yang tertuang di dalam segi linguistik, literasi, karya seni, film, musik dan lain-lain dapat

dikategorikan sebagai kekuatan nasional yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kepentingan nasional Prancis.

3. Konsep Politik Kebudayaan

Kebudayaan bagaimanapun telah menjadi bahasa keseharian yang memiliki artinya masing-masing dalam pikiran manusia, tapi secara konseptual ilmiah, batasan-batasannya masih menjadi perdebatan panjang. Ia masih menjadi tarik ulur antara ilmu-ilmu psikologi, biologi, antropologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Tapi di sisi lain, semua cabang ilmu tersebut telah sepakat bahwa ada dua unsur penting dibalik kenyataan empiris kebudayaan manusia. *Pertama* adalah hal-hal yang tetap, konstan, tidak berubah, dan bisa dikatakan sebagai sifat alamiah manusia terlepas dari realitas permukaan kebudayaannya. *Kedua* adalah hal-hal yang bisa berubah. Ia bergantung kepada realitas dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya. Bahkan, hal ini dipercaya hanya menjadi sebagai penambahan-penambahan, bahkan distorsi-distorsi yang melapisi bahkan mengaburkan apa yang merupakan bagian dari manusia itu sendiri pada dasarnya (Geertz, 1992).

Oleh karena itu, bisa diketahui bahwasanya setiap hal yang berkenaan dengan strategi kebudayaan hanya berkuat pada unsur yang kedua tersebut. Sebab, politik kebudayaan – meminjam istilah Morgenthau – dilakukan oleh satu pihak yang mengontrol sikap dan cara berpikir pihak lain, meskipun tidak sepenuhnya mampu

mengubah watak dasar manusia, kecuali hanya di bagian dasarnya saja (*surface*). Seperti halnya penelitian ini, yang akan membahas sesuatu yang memiliki relevansi jika membahas unsur yang kedua tadi.

Setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat, pasti menjadi sebuah obyek “dekonstruksi” oleh gagasan-gagasan yang mendasarinya. Gagasan itu semacam seperangkat mekanisme-mekanisme kontrol yang memiliki kekuatan untuk mendesain masyarakat dari segi rencana-rencana, resep-resep, aturan-aturan, instruksi-instruksi untuk mengatur tingkah laku manusia. Manusia tidak bisa melepaskan diri darinya, bahkan, menurut Geertz, manusia sangat tergantung habis-habisan terhadap mekanisme tersebut.

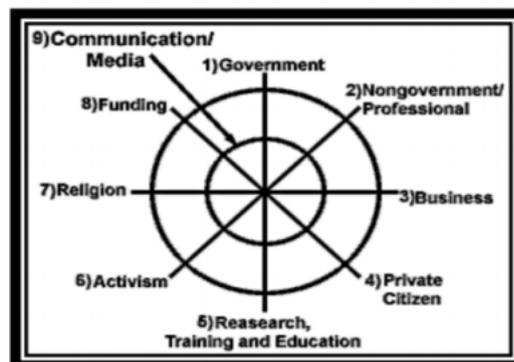
Mekanisme-mekanisme tersebut lambat laun akan merasuk ke dalam alam bawah sadar (*subconscious*) manusia dan mampu mempengaruhi pola pikir, orientasi kebudayaan, perilaku, paham, serta keyakinan-keyakinannya dalam jangka waktu tertentu. Ia akan mengendap menjadi pengalaman, dan tumpukan pengalaman-pengalaman tersebut akan membangun konstruksi di atas peristiwa-peristiwa hidup manusia.

IFI dengan kehadirannya serta aktivitas-aktivitasnya yang kuat dan intens adalah bagian dari mekanisme-mekanisme yang sedang berlangsung, seperti Festival Sinema Prancis ini, tentunya memiliki peran besar dalam proses di atas tersebut tanpa bisa kita elakkan. Ia juga bisa menjadi pintu bagi Prancis agar bisa

melancarkan sebuah “intervensi” budaya kebudayaan dengan tujuan untuk mempengaruhi dan men-”dekonstruksi” budaya lain dengan budaya Prancis. Sekaligus, Prancis bisa memperluas dominasinya di dunia ini dengan intervensi kebudayaannya. Hal seperti inilah yang akan penulis coba gali signifikasinya untuk menganalisis peran kebudayaan yang mampu dilaksanakan oleh IFI di Indonesia melalui Festival Sinema Prancis .

4. Diplomasi Multijalur (*Multi-track Diplomacy*)

Diplomasi Multijalur atau *Multi-track diplomacy* adalah konsep yang dikembangkan oleh Louise Diamond dan John W. McDonald. Multi-track diplomacy merupakan suatu perluasan dan pembedaan antara first track diplomacy dan second track diplomacy yang dibuat oleh Joseph Montville di tahun 1982. Pada tahun 1991, Louise Diamond dan McDonald mengembangkan kedua jalur tersebut menjadi sembilan jalur yakni Pemerintah, conflict resolution professionals, bisnis, warga negara, penelitian, pelatihan dan pendidikan, aktivisme, agama, pendana atau pemberi dana dan media (Diamond & McDonald, 1996).



Gambar 1.1 Konsep *Multi-track diplomacy*

Sumber: Louise Diamond and John McDonald. 1996 *Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace Third Edition*. Kumarin pres. Hal 15

Multi-track diplomacy merupakan kunci dalam implementasi apa yang disebut dengan Soft Diplomacy yang menjadi alat utama diplomasi sekarang ini. Perkembangan diplomasi di era globalisasi menjadikan Diplomasi Publik (Salah satu jenis Multi-track Diplomacy) itu sendiri semakin beragam. Kecenderungan pelaksanaan Diplomasi Publik dengan menggunakan aplikasi Soft Diplomacy dianggap efektif dan efisien karena mudah untuk dilakukan tanpa menelan korban dan menghabiskan biaya besar. Seiring berubahnya paradigma aktor hubungan internasional, pelaksanaan Diplomasi Publik melibatkan berbagai kalangan aktor non-pemerintah. Oleh karena itu, Soft Diplomacy merupakan bentuk nyata dari penggunaan instrumen selain tekanan politik, militer dan tekanan ekonomi, salah satunya yakni dengan mengedepankan unsur budaya dalam kegiatan diplomasi (Yudhantara, 2011).

Multitrack Diplomasi mengacu pada visi total diplomasi dalam arti penggunaan seluruh upaya dari para aktor (diplomat dan non-diplomat) dalam pelaksanaan politik luar negeri, dan keterlibatan daerah sebagai salah satu track. Dalam pelaksanaan diplomasi total, peranan aktor dipandang penting untuk mewujudkan kepentingan dan cita-cita nasional suatu negara (Diplomacy, 2018).

Dalam pelaksanaan politik luar negeri, diplomasi multijalur berakibat munculnya elemen fundamental untuk menipiskan sekat tebal yang semula memisahkan aktor internasional dan aktor domestik dalam mengelola diplomasi. Diplomasi multi jalur kerap melibatkan sejumlah unsur aktor dalam masyarakat, yaitu pemerintah pada jalur utama, dan pada jalur kedua terdapat LSM (NGO), kalangan profesional, kelompok agama, kelompok bisnis, aktivis advokasi, aktivis penelitian, pelatihan, pendidikan, organisasi penyedia dana, media massa, dan warga negara biasa (Shoelhi, 2011).

Pelaksanaan multi-track diplomacy didasarkan pada kesadaran dan keinginan aktor non-negara secara umum dari berbagai kalangan yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda untuk melakukan usaha menciptakan peacemaking dan peacebuilding. Menyikapi bermunculannya aktor-aktor non-negara yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan politik luar negeri suatu negara diharapkan bisa memberi kontribusi yang positif bagi pencapaian kepentingan nasional khususnya dalam membangun citra bangsa yang positif di mata dunia internasional serta dalam mengisi dan mengembangkan kerjasama di berbagai bidang dan mengatasi permasalahan global (Diamond & McDonald, 1996)

Multi-track diplomacy telah menjadikan diplomasi bukan hanya tugas diplomat profesional ataupun Pemerintah dalam pengertian umum, namun merupakan sebuah upaya untuk merangkul dan melibatkan masyarakat dari berbagai negara dalam suatu hubungan yang harmonis guna mewujudkan

persahabatan bangsa-bangsa menuju perdamaian dunia. Selain itu pula, di era globalisasi kini semakin memudahkan hubungan antar negara terjalin dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi transportasi dan komunikasi (internet).

Diplomasi publik atau *second-track diplomacy* dapat didefinisikan sebagai upaya diplomasi yang dilakukan oleh elemen-elemen *non-government* secara tidak resmi (*unofficial*). Dalam hal ini *second track diplomacy* bukan berarti bertindak sebagai pengganti *first track diplomacy*, akan tetapi turut melancarkan jalan bagi negosiasi. Selain itu peranan *second track diplomacy* ini juga untuk melancarkan persetujuan yang dilaksanakan oleh *first track diplomacy*, dengan cara mendorong para diplomat untuk memanfaatkan informasi penting yang diperoleh pelaku-pelaku *second track diplomacy*.

Menurut John W. McDonald (2012) dalam *Journal Conflictologi : The Institut for Multi-track Diplomacy* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjelaskan bahwa, *Multi-track diplomacy* terdiri dari sembilan jalur yaitu sebagai berikut:

1. Track 1 - Pemerintah, atau Perdamaian melalui Diplomasi. Menyangkut pendekatan diplomasi resmi, perumusan kebijakan, dan perdamaian.
2. Track 2 - Non-Pemerintah/Professional, Perdamaian melalui Resolusi Konflik.
3. Track 3 - Bisnis, atau Perdamaian melalui Perdagangan.

4. Track 4 - Private Citizen, melalui Keterlibatan Perdamaian warga negara sipil.
5. Track 5 - Penelitian, dan Pendidikan, atau perdamaian melalui Pembelajaran. Jalur ini mencakup: penelitian, seperti yang terhubung ke program universitas, pola pikir, dan minat khusus pada pusat penelitian.
6. Track 6 - Aktivisme, atau Perdamaian melalui Advokasi.
7. Track 7 - Agama, atau Perdamaian melalui Iman dalam tindakan.
8. Track 8 - Pendanaan, atau Perdamaian melalui Pemberian Resources.
9. Track 9 - Komunikasi dan Media, atau Perdamaian melalui Informasi.

Sistem ini mengharuskan semua track untuk pada akhirnya bekerja sama untuk membangun sebuah proses perdamaian yang akan berlangsung, itu merupakan transisi dari track 1 untuk melacak 2 sulit dicapai , menjadi salah satu masalah utama yang harus dihadapi organisasi (Diamond, 2012:67-68).

Lima dari sembilan *track* tersebut yang digunakan Perancis dalam melakukan diplomasi kebudayaannya di Indonesia, dimulai dengan adanya negosiasi dalam pencapaian kerjasama bilateral, privat citizen, pelatihan dan pendidikan, pendanaan yang diberika Perancis dan juga komunikasi serta media yang membantu Perancis dalam melancarkan diplomasi kebudayaannya, termasuk dalam kegiatan Festival Sinema Prancis ini.

Hipotesa

Dengan melihat permasalahan yang telah diuraikan di atas dan didukung dengan penggunaan teori maupun konsep sebagai kerangka berpikir yang dianggap membantu, maka perumusan hipotesa yang dapat ditarik sebagai kesimpulan sementara dalam penelitian ini adalah:

1. Prancis berkepentingan untuk menciptakan citra positif Prancis di Indonesia melalui perhelatan Festival Sinema Prancis sebagai instrumen mencapai kepentingan nasional lewat *multi-track cultural diplomacy*.
2. Melalui Festival Sinema, Prancis ingin memberikan akses dan gambaran mengenai Prancis kepada masyarakat Indonesia untuk lebih mengenal dan mempelajari mengenai budayanya.
3. Melalui Festival Sinema, Prancis berupaya untuk menjadikan skena sinema Prancis sebagai *counter-culture media mainstream*, terutama Amerika di Indonesia.
4. Mengisi celah kekosongan diplomasi budaya yang dilakukan oleh negara-negara lain, yang biasanya tidak dilakukan melalui Festival Sinema seperti yang dilakukan Prancis.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah Prancis (melalui IFI) menjalankan perannya dalam mencapai kepentingan nasional (*national interest*) Prancis melalui Festival Sinema Prancis sebagai instrumen diplomasi kebudayaan Prancis di Indonesia.
2. Mengeksplorasi kemungkinan terjadinya dialog kebudayaan antara Prancis dan Indonesia melalui Festival Sinema Prancis .

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengambil *sample* salah satu cabang Institut Français d'Indonésie (IFI) di Indonesia, tepatnya di IFI Yogyakarta. Kajiannya terfokus pada penyelenggaraan Festival Sinema Prancis edisi tahun 2013, 2014, 2015 dan 2019 yang diprakarsai oleh IFI Yogyakarta.

Metode Analisis dan Pengumpulan Data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk isu ini adalah penelitian kualitatif observatif. Paradigma penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif, yang

dimulai dengan pemaparan data terlebih dahulu dan pemaparan landasan teoritis digunakan pada bagian akhir untuk menginterpretasi data. Oleh karena itu, penelitian ini akan berisi deskripsi terkait peran IFI dalam keberlangsungan diplomasi kebudayaan Prancis di Indonesia melalui festival sinemanya.

2. Metode Pencarian Data

Pada penyusunan penelitian ini, metode pencarian data yang digunakan melalui data primer hasil observasi dan data sekunder. Data-data penelitian ini diperoleh dari interviu, publikasi resmi lembaga, buku, jurnal, laporan penelitian, *working papers*, berita, dan penelitian sebelumnya.

Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan melakukan pemetaan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh IFI Yogyakarta. Fokus pemetaannya adalah pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesenian, diskusi pemikiran dan penerbitan yang dilakukan oleh IFI Yogyakarta, serta posisinya dalam komunitas kesenian Yogyakarta dan dunia pendidikan. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan terobosan yang bias dilakukan oleh IFI dalam usahanya memperkuat hubungan kebudayaan antara Prancis dan Indonesia. Penelitian ini mendasari diri pada diplomasi kebudayaan Prancis melalui *multi-track cultural diplomacy* di Indonesia.

Adapun struktur penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah berupa uraian singkat dari data mengenai diplomasi kebudayaan antara Prancis dan Indonesia. Rumusan masalah berupa pertanyaan “Mengapa pemerintah Prancis menyelenggarakan Festival Sinema Prancis di Indonesia?” tercipta karena latar belakang masalah yang telah dipaparkan. Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep yang akan digunakan untuk menganalisis masalah sehingga akan membantu penulis untuk membuat hipotesis. Selanjutnya tujuan penelitian dan jangkauan penelitian yang berisi rentang waktu dan fokus penelitian sehingga pembahasan akan lebih mengerucut. Metode analisis dan pengumpulan serta sistematika penulisan sebagai penutup.

Bab II: Berisi pemaparan tentang gambaran umum, sejarah dan perkembangan hubungan bilateral dan kepentingan Prancis secara budaya di Indonesia hingga kerjasama-kerjasama pemerintah Prancis dan Indonesia di beberapa bidang.

Bab III: Berisi penjelasan tentang aktivitas diplomasi kebudayaan Prancis di Indonesia, dalam hal ini adalah Festival Sinema Prancis, serta peran dan pengaruhnya pada skena kesenian, khususnya perfilman di Indonesia. Serta penjelasan lebih lanjut atas terpilihnya Peran IFI sebagai Lembaga representasi kebudayaan Prancis di Indonesia.

Bab IV: Berisi penjelasan tentang kegiatan Festival Sinema Prancis, gambaran umum, sejarah, dan perkembangannya di Indonesia hingga dapat dijadikan sebagai alat atau instrument diplomasi kebudayaan.

Bab V: Berisi tentang penjelasan mengapa Festival Sinema Prancis dapat disebut sebagai diplomasi kebudayaan multitrak dilihat dari beberapa jenis analisisnya.

Bab VI: Memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis dimulai dari bab I hingga bab III yang berisikan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini.